

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENGUATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA BERBASIS DIGITAL
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KARANGBAYAT
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Dr. Regina Niken Wilantari, SE, MSi

Dr. Rafael Purtomo Somaji, SE, MSi

Drs. Budi Nurhardjo, MSi

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER – TAHUN 2021**

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | Judul | : | Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember |
| 2 | Bidang Program | : | Penyuluhan pada masyarakat |
| 3 | Khalayak Sasaran | : | Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember |
| 4 | Ketua Pelaksana | : | |
| | a. Nama | : | Dr. Regina Niken Wilantari, S.E. MSi |
| | b. Pangkat/Golongan | : | Lektor/IIIB |
| | c. NIP | : | 197409132001122001 |
| | d. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi |
| 5 | Anggota : | : | |
| | a. Anggota 1 | : | Dr. Rafael Purtono Somaji, SE, MSi |
| | b. Anggota 2 | : | Drs. Budi Nurhardjo, SE, MSi |
| 6 | Jangka Waktu | : | 6 (enam) bulan, September 2020-Februari 2021 |
| 7 | Lokasi | : | Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember |
| 8 | Biaya : | : | |
| | Biaya yang diperlukan | : | Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) |
| | Sumber Dana | : | Mandiri |

Jember, 29 Maret 2021

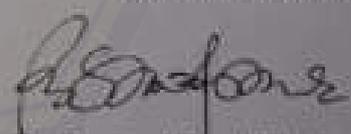
Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Prof. Dr. Isti Fadiah, M.Si
NIP. 196410201990022001



Ketua Pelaksana



Dr. Regina Niken Wilantari, S.E. MSi
NIP. 197409132001122001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Jember
Sekretaris I



Dr. Anwar, M.Si
NIP. 196406061988021001



RINGKASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember melalui wadah working group dosen memiliki tujuan utama membangun keterkaitan ekonomi antara wilayah perkotaan (*urban economy*) dan wilayah pedesaan (*rural economy*). Pada pengabdian yang kedua difokuskan terutama terhadap tata kelola pemerintahan desa sehingga menuju desa yang berdaya saing. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mampu untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa.

Pemerintah desa juga menghadapi persoalan serius yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, kuantitas perangkat desa sangat kurang, dan perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing. Untuk mengatasi persoalan di atas, pemerintah desa berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (*e government*) namun upaya tersebut tidak berhasil diterapkan secara baik karena pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia profesional pada bidang informasi teknologi dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan program e government tersebut. Oleh karena itu pentingnya mendorong aparatur desa dan masyarakat Desa Karangbayat untuk membiasakan diri memanfaatkan pelayanan berbasis internet, dan pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memberikan dukungan terhadap pemerintah desa yang melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah pusat harus mendukung pemerintah desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa seperti penambahan perangkat desa.

Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember akan mengkaji dan membahas tentang persoalan-persoalan tersebut. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Pemerintah Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober 2020-Februari 2021).

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur Desa dan Pembangunan Desa.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan di tingkat desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakatnya berbasis *electronic government* atau *e-government* (teknologi informasi pemerintahan). Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat agar tercipta desa yang mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Desa mandiri merupakan cerminan masyarakat desa yang memiliki kemauan yang kuat untuk maju, menghasilkan produk yang memiliki kekhasan desa/lokal yang membanggakan desa, serta desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemandirian desa dapat dicirikan dengan melihat kemajuan pada infrastruktur, bidang sosial, ekonomi dan budayanya. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan kesiapan dari semua pihak serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good governance*). *Good governance* menurut UNDP (1997) secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan prinsip-prinsipnya pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara keseluruhan serta menghimpun kekuatan kearifan lokalnya. Richard Heeks (2006 : 4) menjelaskan:

“To understand e-government, we must therefore understand IT. What does IT do: it handles data to produce information. The next step to understanding e-government, then, is to understand that e-government systems are information systems. At their heart lie data and information (the latter being defined as data that has been processed to make it useful to a recipient). These are handled by digital (and sometimes non-digital) information technologies”.

Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang. Sesuai dengan solusi *e-government* yang dikemukakan oleh Backus dalam Palvia dan Sharma (2007), terdapat tiga tahap solusi *e-government*, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah

memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi suatu pendukung yang sangat besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Relevansi dari fakta empiris diatas menjadi kerangka landas operasional sebagai dasar untuk melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Desa tersebut menjadi lokasi pengabdian masyarakat didasarkan karena Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru merupakan salah satu desa yang telah belum optimal memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan dan kemandirian desa.

Penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perlu dilakukan sebagai upaya untuk mencapai peningkatan Ukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Nilai indeks itu ditentukan oleh indikator indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah kabupaten Jember dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuannya antara lain menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Oleh karena itu pengabdian masyarakat dari working group dosen Prodi Ekonomi Pembangunan S1 berfokus pada tata kelola pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat agar terwujud *good governance*. Pemerintah Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi (Sistem Informasi Desa) sebagai dasar utamanya. Penggunaan teknologi informasi di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember hanya sekedar media untuk promosi potensi Desa serta penyebar luasan rencana pembangunan, dan belum sampai pada taraf pelayanan administratif dan pelayanan publik lainnya. Pelayanan publik masih dilakukan secara manual karena pemerintah

desa belum memiliki sistem yang dapat mendukung pengelolaan data di desa, serta keterbatasan kemampuan perangkat desa di bidang teknologi informasi.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan sistem pelayanan publik yang belum memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*) sehingga masih banyak mengalami masalah, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta hambatan regulasi dalam penyelenggaraan sistem informasi desa tersebut. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Aspek kesenjangan itu memberikan implikasi terhadap belum diterapkannya teknologi informasi (*e-government*) di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

1.2 Perumsan Masalah

Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember selama ini dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa masih menggunakan sistem manual sehingga berdampak terhadap pelayanan publik baik kecepatan maupun kualitas layanan. Oleh karena itu pentingnya penguatan terhadap tata kelola pemerintah desa yang berbasis teknologi informasi (*e-government*). Pengembangan sistem informasi pemerintahan desa (*e-government*) menjadi penting karena dengan sistem ini akan memudahkan aparat desa untuk menerapkan manajemen pemerintahan desa yang cepat, efektif dan transparan. Akan tetapi pelaksanaan (*e-government*) pada Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember masih menghadapi banyak kendala. Salah satu, diantaranya adalah pada kualitas sumber daya manusia perangkat desa, selanjutnya adalah informasi/data yang belum akurat dan valid. Hal ini menjadikan potensi-potensi ekonomi yang berada di wilayah Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember terdampak belum terkelola dengan baik sebagai sektor penggerak APBDesa. Selain itu yang utama adalah pelayanan publik untuk masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu

pentingnya untuk dilakukan pengabdian masyarakat terkait Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa dalam melakukan pengelolaan tata kelola administrasi desa berbasis digital (E-Government).
2. Memperluas dan mengefektifkan pelayanan administrasi desa berbasis digital (E-Government) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan kepada masyarakat desa.
3. Meningkatkan kriteria ukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dimana indeks itu digunakan untuk menggeser dari Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri yang berdaya saing.
4. Meningkatkan keberhasilan dari program-program pembangunan perdesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ini adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam melakukan pengelolaan tata kelola administrasi desa berbasis digital (E-Government).
2. Tercapainya efektifitas pelayanan administrasi desa berbasis digital (E-Government) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan kepada masyarakat desa.
3. Terwujudnya peningkatan kriteria ukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dimana indeks itu digunakan untuk menggeser dari Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri yang berdaya saing.
4. Terwujudnya peningkatan keberhasilan dari program-program pembangunan perdesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Government

E-Government menurut Bank Dunia (*The World Bank Groups*) memberikan pengertian:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government”.

E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (web) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Level interaksi yang disediakan oleh teknologi *E-Government* adalah dapat berupa penyediaan informasi, interaksi, proses pelayanan, dan transaksi. Secara sederhana Heeks (1999) dalam mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut: “Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat”. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama *E-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Untuk tahap pelaksanaan *E-Government*, banyak konsep yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara. Menurut Gardner Research (2000) dalam studi berjudul “*Gartner’s Four Phases of eGovernment Model*”, secara umum tahap *E-Government* dibagi ke dalam empat langkah (Al-Hasmi and Abdul Basit Darem, *Understanding Phases of E-Government Project*, <http://www.csi-sigegov.org>), yaitu:

1. Penyampaian informasi awal (presence) : *This stage is classified by a simple information providing Web site of a passive nature, sometimes described as “brochure ware,” indicating the same level of functions as a paper brochure. Interaksi (interaction): The interaction stage offers simple interactions between government and citizen (G2C), government to business (G2B), or government agency to government agency (G2G). Interaction stage Web sites provide e-mail contact and interactive forms that generate informational responses.*
2. Transaksi (transaction): *The transaction stage enables transactions such as paying for license renewals online, paying taxes or fees, or submitting bids for procurement contracts. Transformasi (transformation): The highest stage, most closely aligned with the concept of governance, involves a reinvention of how government functions are conceived and organized.*

Lebih lanjut Backus menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok utama yang dapat dibedakan berdasarkan sasaran *e-government* yaitu : pemerintah, masyarakat, dan

kelompok/bisnis dengan kepentingan tertentu yang dikenal dengan istilah G2G (*government-to-government*), G2C (*government-to-citizen*), dan G2B (*government-to-business*). G2G-*Government to Government*“. G2G berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi antar organisasi/instansipemerintah yang berbeda”.G2C-*Government to Citizen*“G2C merupakan suatu aktivitas dimana pemerintah menyediakan akses online secaraterus menerus ke suatu informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat”. G2B-*Government to Business*“Pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor bisnis seperti suppliers denganmenggunakan internet dan TIK lainnya”.

Huseini (1999) dalam paparannya menguraikan adanya tiga jenis tantangan dalam penerapan e-Government yakni yang bersifat tangible, intangible dan very intangible (dalam Muluk, 2001). Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasaran fisik jaringan telekomunikasi dan listrik termasuk yang tangible. Sedangkan yang intangible misalnya tantangan financial, dan keterbatasan SDM. Sementara yang tergolong very intangible adalah keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan e-Goverment berikut penerapan berbagai tindakan sebagai konsekwensi yang harus dilakukan seperti menegakkan disiplin atas segala pelanggaran serta bagaimana membangun knowledge society di kalangan birokrasi pemerintah itu sendiri (Muluk, 2001). Istilah good governance sebenarnya menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku governing, yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah public dalam suatu negeri berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Horby, 1974).Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

2.2 Paradigma Pembangunan Pedesaan Berbasis TIK

Paradigma merupakan suatu yang penting menjadi dasar dalam upaya memahami secara mendalam masalah-masalah kehidupan yang dihadapi dan mengatasinya secara mendasar. Pada tahapan praktis tertentu, paradigma pembangunan juga dapat dipandang sebagai kesatuan teori, model, strategi dan sistem pengelolaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Nawawi, 2009). Berbeda dengan konsep pembangunan tradisional yang umumnya menganalogikan masalah pembangunan dengan “keterbelakangan” (paradigma modernisasi) dan atau

“ketergantungan” (pada paradigma dependensia), sains baru melihat masalah itu sebagai akibat dari adanya tatanan yang mengalami stagnasi dan atau terisolasi dari lingkungannya (Amien, 2005). Kondisi itu sering dialami oleh desa yang mengalami stagnasi daam pembangunan dan terisolasi dari pusat pembangunan. Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, perlu ada perubahan paradigma dalam melihat desa.

Salah satunya menurut Zaini (2010) adalah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (base on village). Berkaitan dengan pengembangan infrastuktur TIK di pedesaan, dalam UndangUndang No. 6 Tahun 2013 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pedesaan. Misalnya dalam Pasal 86 UU Desa terdapat poin-poin berikut ini :

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
3. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Paradigma pembangunan pedesaan berbasis internet penting dilakukan ditengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena menurut (Amien 2005) kesediaan informasi merupakan “hak asasi” setiap komponen, karena pada dasarnya komponen tatanan membutuhkan informasi yang akurat serta tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat demi untuk memilih mempertahankan keberlangsungan keberadaannya dan juga untuk meningkatkan kualitas partisipasinya dalam membangun tatanannya. Berdasarkan hasil penelusuran sumber data yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa

paradigma pembangunan pedesaan yang dibangun melalui GDM dilakukan dengan beberapa tahapan (Suparyo, 2013):

1. Mengembangkan jaringan informasi pedesaan berbasis internet dengan membangun website desa-desa dengan domain desa.id;
2. Mendorong desa mandiri teknologi dengan migrasi ke teknologi open source
3. Meningkatkan pelayanan publik dengan aplikasi mitra desa;
4. Mengelola sumber daya berdasarkan profil desa dengan survei sumber daya dan data geospasial dengan aplikasi lumbung desa (lihat: mitra.or.id);
5. Membangun desa dengan interkoneksi sistem dan regulasi yang mendukung desa untuk mengambil inisiatif pembangunan

2.3 Redesign Manajemen Pemerintahan Desa

Taliziduhu (1999) berbicara panjang soal beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat desa. Taliziduhu mendekonstruksikan dan menemukan prasyarat-prasyarat baru dalam pemerintahan desa masa depan. Menurutnya ada 6 ciri dalam pemerintahan desa sistem sentralisasi di era orde baru, yaitu

1. Tidak ada option (pilihan) bagi rakyat. Kebijakan yang ada sifatnya paket, sehingga masyarakat mau tidak mau harus memilih yang satu itu.
2. Rakyat juga tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Misalnya, rakyat yang menjadi petani tidak bisa memilih jenis padi apa yang akan ia tanam. Keberadaan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), misalnya, telah memaksa rakyat untuk menyewahkan tanahnya untuk ditanami tebu, walau hasilnya tidak terlalu produktif secara ekonomis.
3. Rendahnya kontrol sosial. Demokrasi mensyaratkan adanya hak rakyat untuk mengontrol kekuasaan dan itu tidak terjadi dalam sistem pemerintahan orde baru.
4. Tidak adanya petepatan janji, dan
5. Rendahnya kepercayaan. Krisis kepercayaan ini terjadi dimana-mana, penurunan Kepala Desa di berbagai daerah sebenarnya merupakan manifestasi atas ketidakpercayaan rakyat terhadap kepala desa dan kekuasaan pemerintahan pada umumnya. Karena itu, berdasarkan masalah-masalah pemerintah desa yang terjadi pada sistem lama,

Taliziduhu membicarakan tentang tiga jurus menuju desa masa depan; pertama, pengembalian fungsi desa sebagai fungsi sosial. Kedua, perlunya pemberdayaan desa dalam berbagai aspek, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Ketiga,

pentingnya desa sebagai pusat latihan demokratisasi. Bagaimanapun desa sebagai struktur kekuasaan terendah dan punya akses langsung ke rakyat sangatlah cocok untuk dijadikan latihan demokrasi di tingkat basis masa. Sesuai dengan Taliziduhu, Soetandyo (2009) menjelaskan mengenai kesiapan lokal untuk mengakomodasi perubahan tatakelola desa mestinya dapat dilakukan tidak hanya dengan cara mendengar pertimbangan-pertimbangan politis para elit, akan tetapi juga mendengarkan apa yang disuarakan rakyat dikalangan masyarakat hukum adat beserta para pemukannya.

Secara tidak langsung, di era reformasi, jurus-jurus desa masa depan yang disampaikan Taliziduhu di atas telah diakomodir secara komprehensif oleh pemerintah melalui UU No.06 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa tersebut memosisikan desa sebagai wilayah otonom, memberikan anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan kebebasan (demokrasi) kepada masyarakat desa untuk memilih kepala desa secara langsung, untuk ikut terlibat dalam penyusunan program pembangunan dan anggaran desa, dan untuk ikut terlibat dalam pengawasan pembangunan desa.

BAB III : MATERI DAN METODE

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember meliputi berbagai tahapan. Metode yang digunakan adalah ceramah tentang penyusunan dan penerapan (*E-Government*), pelatihan melalui audiovisual perencanaan dan penyusunan (*E-Government*) terhadap pelayan publik administrasi kependudukan, pelatihan penyuluhan pembuatan dokumen dalam perencanaan administrasi pelayanan publik berbasis digital, pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan berbasis digital, yang terdiri dari : RPJMDes dan RKPDes. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap pemahaman tentang penyusunan dan penerapan (*E-Government*).
Pemahaman dan perluasan wawasan tentang penyusunan dan penerapan (*E-Government*) dilakukan terlebih dahulu kepada kelompok aparatur desa yang berhubungan dengan pelayanan dan pelaksanaan administrasi pembangunan desa. Pemahaman ini bertujuan untuk membentuk kerangka berpikir yang maju dan modern serta melihat kedepan terkait dengan tata kelola pemerintahan desa khususnya berbasis pada digital.
2. Identifikasi terhadap kemampuan SDM aparat desa pada penguasaan IT.
Melakukan identifikasi atas kualitas dari SDM aparat desa yang terkait dengan pengelolaan dan penyusunan administrasi pelayanan publik dan administrasi pembangunan desa. Informasi yang terkumpul harus benar-benar objektif ,realistis dan secara detail. Informasi yang detail dan lengkap akan memudahkan pengelolaan dan penyusunan bagi tata kelola pemerintahan berbasis digital (*E-Government*).
3. Pelatihan pengelolaan dan penyusunan pelayanan publik berbasis IT.
Materi pelatihan berkaitan dengan muatan pemanfaatan penggunaan sumberdaya IT yang dimanfaatkan sebagai dasar operasional administrasi publik dan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi penting karena *E-Government* akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan video untuk memudahkan kelompok aparatur desa dan masyarakat mudah untuk menerima informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.
4. Membentuk kelompok *working group E-Government* sebagai implementasi dari

adanya proses pendampingan terhadap tentang tata kelola pemerintahan berbasis digital (*E-Government*).

5. Mengembangkan dan mengoperasionalkan kualitas pemerintahan desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital (*E-Government*) adalah melalui penerapan terhadap administrasi kependudukan dan program-program pembangunan.

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah :

1. Kelompok aparaturnya pemerintahan desa sebagai aktor utama terhadap pengelolaan tata kelola administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) yang efektif dan Efisien.
2. Masyarakat desa sebagai salah satu stakeholder yang terlibat pada kegiatan perencanaan pelayanan administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat pada kegiatan perencanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan pelayanan administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan.
4. Kepala desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang direncanakan di wilayah kerjanya sehingga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3.3 Keterkaitan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mempunyai keterkaitan dengan : (1) Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Jember, yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jember sebagai pembina pemberdayaan masyarakat, (3) Kantor Kecamatan Sumberbaru di Kabupaten Jember sebagai lembaga koordinasi yang mempunyai komitmen dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan di Desa Karangbayat.

3.4 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021																				
		Sept			Okt			Nov			Des			Jan			Peb					
1	Pengurusan ijin																					
	Pemilihan lokasi																					
	Identifikasi masalah																					
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dokumen dan informasi basis data administrasi desa • Identifikasi kemampuan SDM terhadap penguasaan IT • Identifikasi stake holder terkait pelayanan publik dan pembangunan desa 																					
2	Membentuk working group peningkatan kualitas SDM aparat desa terhadap IT																					
	Melakukan pendampingan pengelolaan serta penerapan administrasi desa berbasis IT																					
	Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM terhadap pelayanan publik berbasis IT																					
	Melakukan penyuluhan penerapan administrasi publik terhadap masyarakat desa																					
	Evaluasi Kegiatan																					
	Konsultasi																					
3	Penyusunan laporan																					

1.5 Kelayakan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kerjasama antara dosen-dosen dari lingkup Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi yang dimiliki tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat relevan untuk mendukung kelancaran terwujudnya program yang akan diusulkan. Kompetensi yang dimiliki oleh tim pelaksana dapat dilihat pada tabel dibawah.

1. Ketua Tim Pengusul :

a.	Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Regina Niken Wilantari, SE, MSi
b.	Jenis Kelamin	Perempuan
c.	NIP	197409132001122001
d.	Bidang Keahlian	Ekonomi Moneter
e.	Pangkat / Golongan	Lektor/ III C
f.	Jabatan Fungsional	Lektor
g.	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / IESP
h.	Waktu untuk Pengabdian	9 jam / minggu

2. Anggota Pelaksana

a.	Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Rafael Purtomo Somaji, SE, MSi
b.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
c.	NIP	195810241988031001
d.	Bidang Keahlian	Ekonomi Perencanaan Regional
e.	Pangkat / Golongan	Lektor / III D
f.	Jabatan Fungsional	Pembina
g.	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / IESP
h.	Waktu untuk Pengabdian	9 jam / minggu

a.	Nama Lengkap dan Gelar	Drs. Budi Nurhardjo, M.Si.
b.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
c.	NIP	19570310 198403 1 003
d.	Bidang Keahlian	Manajemen Sumber Daya Manusia
e.	Pangkat / Golongan	Lektor Kepala/IVA
f.	Jabatan Fungsional	Pembina
g.	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / Manajemen
h.	Waktu untuk Pengabdian	9 jam / minggu

1.6 Biaya Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Biaya pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa komponen yang diuraikan pada tabel di bawah.

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
1	Perijinan dan percetakan proposal	500.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masy	2.500.000,-
3	Perjalanan	750.000,-
4	Bahan habis pakai	750.000,-
5	Laporan dan diseminasi hasil	1.000.000,-
	Jumlah Anggaran keseluruhan	6.500.000,-



BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Karangbayat kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember

Pasca UU No. 06 tahun 2014 tentang desa pengesahan dan diimplementasikan, pemerintah desa mengalami dilema merespon UU Desa tersebut. Satu sisi, pemerintah desa menilai UU Desa adalah peraturan perundang-undangan yang “memanusiakan” posisi pemerintah desa karena UU Desa memberikan hak otonomi kepada pemerintah desa untuk mengelola desa sesuai potensi dan identitas desa masing-masing. Pada sisi lain, pemerintah desa merasa belum siap menerima dan menjalankan otonomi desa karena pemerintah desa belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai amanat UU Desa. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) tahun pertama (2016) ini adalah menguraikan dilematisasi pemerintah desa tersebut dan menjelaskan langkah-langkah pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa (fungsi perencanaan, tatakelola administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa) berbasis teknologi informasi (E-Government) di era otonomi desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Perubahan peraturan perundang-undangan membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government. Tata kelola administrasi desa berbasis digital merupakan Sarana Media Informasi Publik yang digunakan untuk Pengelolaan sistem informasi administrasi kantor pemerintahan desa serta sebagai Pendukung fungsi dan tugas kantor desa, termasuk pelaporan administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, dan lainnya.

Dengan adanya penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital Kantor desa akan lebih efisien. Misalnya, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan cara manual. Selain itu, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung. Kantor desa lebih efektif karena dalam menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah dan

cepat untuk memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Hal ini berbeda dengan proses serupa tanpa adanya tata kelola berbasis digital di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.

Pemerintah desa lebih transparan yaitu dengan pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah, cepat dan tepat disajikan kepada warga dan dapat juga lebih mudah, cepat dan tepat juga diakses oleh warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai tata kelola berbasis digital untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di website desa, papan pengumuman dan lain sebagainya. Pemerintah desa lebih akuntabel dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa yang terdapat dalam tata kelola berbasis digital yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, penggunaan dana desa. Layanan publik lebih baik seperti disebut di atas, dengan tata kelola berbasis digital kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa Dengan tata kelola digital, informasi kependudukan, informasi data dasar keluarga, perencanaan, asset, anggaran dsbnya akan terrekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di website desa.

Membangkitkan selalu semangat Gotog Royong Warga untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, tata

kelola berbasis digital juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik.

Berikut akan dijelaskan mengenai konsep yang akan diterapkan dalam Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Antara lain :



Gambar 1. Rancangan Konsep penguatan tata kelola berbasis digital

Adapun target utama yang akan menerima materi penguatan tata kelola berbasis digital adalah perangkat desa di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada khususnya yang kemudian setelah para perangkat desa dan selanjutnya di lanjutkan sosialisasi terhadap masyarakat desa guna menginformasikan mengenai kemudahan mengakses kebutuhan pelayanan yang terdapat di desa.

4.2 Perbandingan tata kelola administrasi desa berbasis digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Karangbayat kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember sebelum dan sesudah penguatan

Dengan adanya penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital, membantu Kantor desa akan lebih efisien terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government. Tata kelola administrasi desa berbasis digital merupakan Sarana Media Informasi Publik yang digunakan untuk

Pengelolaan sistem informasi administrasi kantor pemerintahan desa serta sebagai Pendukung fungsi dan tugas kantor desa, termasuk pelaporan administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, dan lainnya.

Berbeda dengan sebelum adanya penguatan tata kelola desa berbasis digital, yaitu dalam proses Kantor desa kurang efisien terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa sehingga kantor desa tidak mudah dan cepat untuk memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran.

Tabel 1. Perbedaan pengelolaan tata kelola desa sebelum dan sesudah penguatan berbasis digital

No.	Sebelum Penguatan Berbasis Digital	Sesudah Penguatan Berbasis Digital
1.	Penyediaan layanan surat keterangan pada warga yang belum efisien karna menggunakan cara manual.	Dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan cara manual. Selain itu, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung
2.	Tanpa adanya tata kelola berbasis digital di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.	Dalam menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah dan cepat untuk memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran.
3.	Kurang transparannya pemerintah desa karena data base mengenai informasi kegiatan desa masih di simpan secara manual sehingga kesusahan menyajikan data kepada warga.	Pemerintah desa lebih transparan yaitu dengan pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah, cepat dan tepat disajikan kepada warga dan dapat juga lebih mudah, cepat dan tepat juga diakses oleh warga.
4.	Kurang akuntabel dalam informasi perencanaan, kegiatan	Pemerintah desa lebih akuntabel dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan,

	pembangunan, penggunaan dana desa.	penggunaan dana desa yang terdapat dalam tata kelola berbasis digital yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, penggunaan dana desa.
5.	Kurangnya tempat informasi yang dapat diakses warga mengenai kegiatan yang akan di laksanakan desa	Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa.

4.3 Kelemahan dalam penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Karangbayat kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember

Berbagai hambatan yang ditemukan dalam penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital, yaitu hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa secara umum adalah:

1. Hambatan utama yang paling banyak terjadi adalah good will dari pemerintah daerah untuk menerapkan e-governance.
2. Kurangnya dukungan fasilitas teknologi informasi, masalah kapasitas sumber daya manusia baik dalam pemerintahan maupun masyarakat desa sebagai pengguna layanan masyarakat tersebut.
3. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Karangbayat bukan hanya dari keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem informasi desa saja, tetapi juga kendala penerimaan dari masyarakat terhadap perubahan culture birokrasi

Sementara itu, Hambatan yang muncul dalam dalam penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital pada Desa Karangbayat dapat ditanggulangi dengan cara:

1. Pemerintah Desa Karangbayat pada awal penetapan sistem informasi desa adalah dengan mengirim perangkat desa untuk mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan sistem informasi yang diselenggarakan. Dari hasil pelatihan sistem informasi desa ini membawa dampak pada perubahan prioritas pembangunan di Desa Panjalu, artinya pembangunan sumber daya manusia menjadi yang paling utama dibutuhkan saat itu dengan mengikut sertakan perangkat desa dan beberapa kader untuk mengikuti pelatihan teknologi informasi. Pemerintah Desa Panjalu juga membuka peluang bagi masyarakat desa atau komunitas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sistem informasi desa agar kemampuan literasi masyarakat meningkat sehingga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.
2. Untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif pemerintah desa Karangbayat melakukan interaksi secara interaktif karena keterbatasan sumber daya manusia dan faktor pendukung lainnya terutama faktor kesiapan teknologi infomasinya. Sampai saat ini Pemerintah desa belum memiliki basis data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem informasi desa. Untuk itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung sistem tata kelola sumber daya desa. Pemerintah desa juga belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data di desa sehingga pelaporan disajikan banyak berdasarkan asumsi semata.

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Tuntutan perkembangan teknologi dan aturan perundang-undangan memaksa pelaksanaan Pemerintahan di Desa mengubah pelayanan dilakukan secara manual menjadi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (sistem informasi desa). Selama ini pemerintah desa melakukan pelayanan publik secara manual dan belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data sehingga waktu yang diperlukan pun menjadi lebih lama. Pemerintah desa Karangbayat kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember belum memanfaatkan teknologi informasi sejak belum berlakunya UU No. 6 tentang Desa atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat. sehingga dalam pelaksanaannya, masih belum dilakukan secara informative maupun interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui situs web. Walaupun demikian, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi/e-governance (penggunaan aplikasi) khususnya untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat. Selama perjalanannya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi di desa Karangbayat kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil tahap interaktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan fasilitas teknologi informasi, masalah kapasitas sumber daya manusia baik dalam pemerintahan maupun masyarakat desa sebagai pengguna layanan masyarakat tersebut. Oleh karenanya interaksi dan sinergi yang efektif dan optimal sangat diperlukan, hal ini hanya dimungkinkan dengan diterapkannya e-Governance secara optimal. Sebagai konsep aplikatif, e-governance memang menawarkan alternative strategi mengubah pola kerja dan perilaku birokrasi. Hambatan utama yang paling banyak terjadi adalah good will dari pemerintah daerah untuk menerapkan e-governance.

5.2 Saran

Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi informasi (egovernance) dalam pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah Desa Karangbayat perlu meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam bidang teknologi informasi serta lebih intens lagi dalam menggandeng komunitas masyarakat yang melek teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Desa Karangbayat perlu menata ulang basis data agar dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat

sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Peran serta masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ditunjang oleh teknologi informasi untuk lebih ditingkatkan lagi, hal ini perlu dukungan promosi dan penyebaran informasi dari pemerintah Desa kepada masyarakat sehingga daya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Desa juga perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun jaringan teknologi informasi sehingga tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Bachus, Michiel, *E-governance in Developing Countries*, IICD Research Brief No.1, March, 2001.
- HAW. Widjaja, 2005. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3.
- HAW. Widjaja, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, SushilS. (2007). *E-Government and EGovernance:Definitions/DomainFramework and Status around theWorld*. Di dalam Agarwal, Ashok, et al(eds.) *Foundations of E-government*.5TH International Conference On EGovernance.Hyderabad, hal. 1-12.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Indonesia, 2003, pp. 53–65.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Indonesia, pp. 1–110, 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri (2007) *Kader Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri (2007) *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Muluk, M.R. Khairul, *Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Nomor 37. 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Nomor 66. 2007. *Perencanaan Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. .Nomor 35.2007. *Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Richard Heeks, *Implementing and Managing E-Government* Sage Publication Limited, London: 2006, p. 4.
- Siagian, Sondang. (1990). *Filsafat Administrasi*. Cet. 21. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.
- The Liang Gie. (1987). *Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja
- Y. Yudhanto, "E-government untuk Desa," Rumah Studio, 2016. [Online]. Available: <http://rumahstudio.com/2016/10/29/egovernment-untuk-desa/>. [Accessed: 05-Dec-2018]
- Y. Mayowan, "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)," *PROFIT J. Bus. Adm. FIA UB*, vol. 10, no. 1, 2016.

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Penyuluhan ADD di Desa Karangbayat





Lampiran 2 : Daftar Hadir Peserta Penyuluhan ADD di Desa Karangbayat

HARI / TGL 5-6 Januari 2021
 ACARA Penyuluhan ADD
 TEMPAT Balai Desa Karangbayat

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Muly Anwar	KABAS	KR. Bayat	1
2	Murtalilyah	sekdes	Kr. Bayat	2
3	Dani Fathomas	staf	Kr. Bayat	3
4	Erly Murhayati	kaur umum	Kr. Bayat	4
5	Martawati	K. Pem	Kr. Bayat	5
6	BULHADI	KASUM	MANG BUREKAT	6
7	ELYAS	k. perencanaan	Congopan	7
8	Matdrais	wakasum	Krajane	8
9	ETIAN TRI ARYANI	K. Kanyan	uripai	9
10	SUWARNO	UM SOM	CONGROPAN	10
11	SARMAWI	KABAS	KR. ANOM	11
12	Tegeh Widi P.	FEB-UNET	JEMBER	12
13	Hekman Cahyo	FEB-UNET	Jember	13
14	Rafael	FEB-UNET	JEMBER	14
15	Endah	FEB-UNET	JEMBER	15
16	Sebastiana V	FEB-UNET	JEMBER	16
17	Aisah Jumiati	FEB-UNET	JEMBER	17
18	Nanik Ishyani	FEB-UNET	JEMBER	18

TREN TIK GLOBAL

MENGAPA IT ???



2,4 Milyar
Pengguna Internet
di seluruh dunia

Perkembangan Smartphone
Android,
blackberry, iPhone,
Windows mobile



Tren Sosial Media
- 1 Milyar Orang Pengguna Facebook
- 500 juta orang pengguna twitter



Google search akses/bulan :
15jt akses (1999)
2,7 M (2006)
10,9M (2010)

Sumber: globalwebindex.net

Dasar Hukum



- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
- UU No.14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Inpres 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Gov

Dasar Pemikiran

- ❖ **TIK** adalah salah satu **pilar utama pembangunan peradaban** manusia saat ini yang harus mampu memberi **nilai tambah** bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses **transformasi menjadi bangsa yang maju**
- ❖ Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak **memerlukan penggunaan TIK**
- ❖ **Masyarakat yang cerdas**, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan **siswa cerdas**, gerakan **desa maju**, gerakan **guru cerdas**, gerakan **pesantren cerdas**, gerakan **petani cerdas**, gerakan **aparatus cerdas**, gerakan **nelayan pintar**, dll.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan e-Government

■ Tujuan

- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- Perbaiki organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan

■ Sasaran Pembangunan e-Gov

- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Menuju e-Government



Transformasi

- Perubahan Budaya Kerja
- Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- SOP dan Kebijakan Politik
- Peraturan dan Perundangan
- Leadership

Pemanfaatan ICT

- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- Sistem Dokumentasi Elektronik

Mengapa Desa perlu IT?

TRANSFORMASI



Manual Based



PENDIDIKAN



Electronic Based



Kopi Darat



BUDAYA



Skype, Line, WA, dsb



Pasar, tatap muka langsung



SOSIAL



Belanja Online melalui internet
Tanpa tatap muka

DESA BASIS DATA → real time



PROBLEM yg dihadapi dg DATA



“Tersedia” tetapi tidak mudah diperoleh



“Tersedia” tetapi tersebar di berbagai situs



“Tersedia” tetapi hanya bisa view (PDF Format)



“Tersedia” tetapi berbayar



“Tersedia” tetapi kualitas kurang memadai



Terbuka dan mudah diakses - *easy to access*



Terbuka untuk digunakan kembali - *reuseable*



Terbuka untuk disebar dan dapat diolah kembali dengan mudah – *redistributed & machine readable*



Bebas Biaya – *free of charge*

**PROFIL DESA, MONOGRAFI DESA, DATA PKK, APBDDES,
LAPORAN KEUANGAN, LAP KETENGARAN PERTANGGUNGJAWABAN**

INISIATIF PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA INFORMASI BERBASIS TIK

APA YANG HARUS DISIAPKAN ????

1

- SUMBER DAYA MANUSIA

2

- INFRASTRUKTUR

3

- JARINGAN INTERNET
(INTERCONNECTED NETWORK)

4

- PENGEMBANGAN APLIKASI

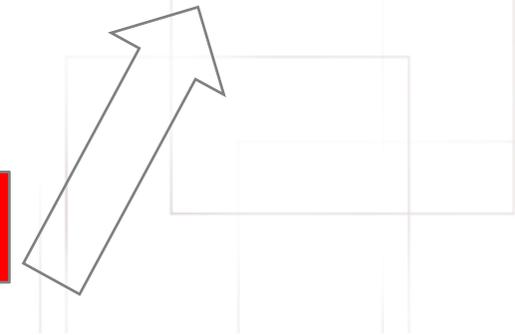




**BLC
TELKOM**



GIMANA CARANYA BISA





MATOH TENAN.....

BAGAIMANA BEAYA NYA ?????

- 1. PELATIHAN SDM**
- 2. PENGADAAN SARANA**
- 3. PEMELIHARAANNYA**
- 4. OPERTASINALNYA**
- 5. KELEMBAGAANNYA → KIM, PENGELOLA WEW, DATA**

MEKANISME KEBUTUHAN ^{menuju} => KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Pasal 86 dibahas Sistem Informasi Desa)

No.	URAIAN	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
1.	SUMBER DAYA MANUSIA (PENGELOLA DAN PENGGUNA)	Mandiri	Pendampingan
2.	INFRASTRUKTUR - Komputer dan Sarana pendukung	✓	-
3.	JARINGAN INTERNET (INTERCONNECTED NETWORK) -Tower Jaringan internet -Bandwidth -Hosting	✓ ✓ -	Bertahap ✓ ✓
4.	PENGEMBANGAN APLIKASI	✓	✓

TERIMA KASIH



**KEBERHASILAN TIDAK HANYA DILIHAT DARI HASIL, NAMUN SEBERAPA
BESAR PERJUANGAN UNTUK MENGATASI BERBAGAI KESULITAN GUNA
MERAH HASIL**

